

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Utara



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Gatot Subroto No. 361 Medan

Nomor Telepon : 4557009-4522894

Website : bakesbangpol.sumutprov.go.id

E-mail : bakesbangpolprovsu@gmail.com

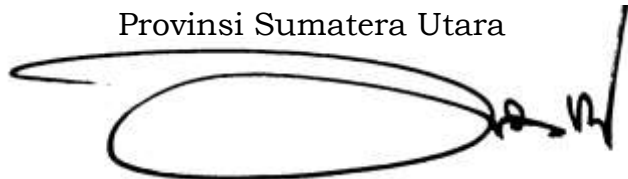
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara serta Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Bakesbangpoldagri di tahun mendatang.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara



Ir. Ardan Noor, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660926 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III.....	14
3.1 Capaian Kinerja.....	14
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	15
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	17
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	18

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	19
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	221
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	22
3.2	Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV		27
LAMPIRAN		28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	11
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	13
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	15
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	16
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	17
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	18
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	19
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	21
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	23
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Tugas Pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

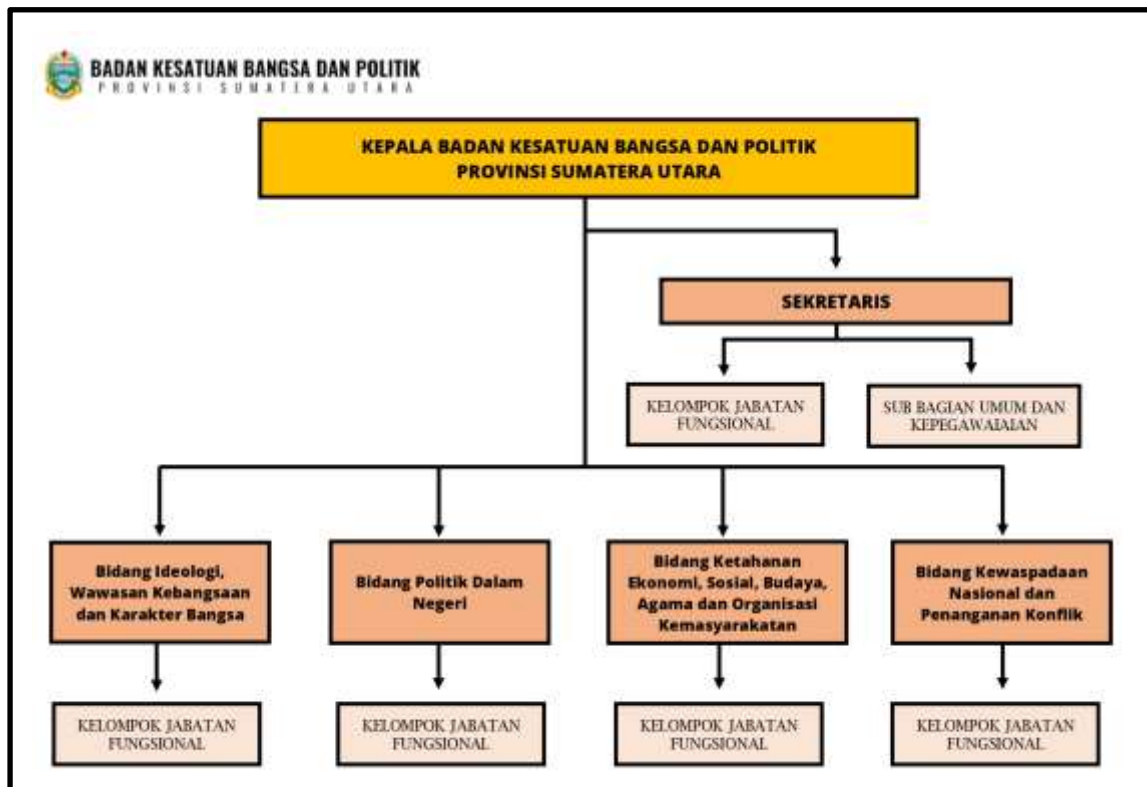
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama serta organisasi kemasyarakatan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1(2022)	Rp 78.148.403.200
APBD	Tahun n(2023)	Rp 399.049.307.854
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bakesbangpol Provsu

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat disampaikan beberapa permasalahan yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan ini berasal dari Internal OPD sendiri maupun dari Eksternal OPD, dan berikut akan disampaikan permasalahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya ASN yang ada di Bakesbangpol	Banyak ASN yang berumur hampir dan diatas 50 Tahun bahkan hampir memasuki masa purnabakti Sehingga kurang update dan peremajaan keahlian terutama didalam penggunaan komputer juga pelaksanaan teknis ke lapangan
2.	Pelatihan	ASN yang belum terlatih terkait Intelijen	Terbatasnya slot pendidikan intelijen bagi ASN Bakesbangpol Provsu baik pelaksanaan dari pusat maupun daerah.
3.	Kelembagaan	Kedudukan OPD Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah belum sesuai dengan amanah Regulasi yang ada, disamping itu terdapat perbedaan nomenkelatur OPD Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Adanya rencana pengalihan OPD Kesbangpol menjadi Instansi Vertikal sejak tahun 2014 sesuai Undang – Undang Pemerintah Daerah

		Terdapat Forum – Forum Strategis yang melekat dengan Kesbangpol, dimana untuk Anggaran Operasional dan Kegiatan Forum ini juga berada pada OPD Kesbangpol	Alokasi Anggaran yang tersedia disamping untuk Kesbangpol juga dialokasikan untuk Anggaran Forum dimaksud.
4.	TAPD	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan Pemerintahan Umum Sumatera Utara	Kurangnya perhatian TAPD terhadap Kegiatan bidang politik dan pemerintahan umum terkait pengalokasian anggaran

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis dan Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	1. Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.300 Orang	1.100 Orang	260 Orang	1.275 Orang	1.300 Orang
			Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	300 Orang	350 Orang	400 Orang	425 Orang	550 Orang
			Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	20 Ormas	20 ormas	30 Ormas	40 Ormas	50 Ormas
			Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 9	Peringkat 9	Peringkat 8	Peringkat 8	Peringkat 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	2. Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Laju Angka Prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	6,5 %	6,3 %	6,1 %	5,9 %	5,7 %

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Periode 2019 - 2023

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.	Orang	Untuk meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Kebangsaan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembekalan tentang wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pelopor PemilihCerdas	2.	Orang	Salah satu indikator untuk menilai Demokrasi adalah aspek tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	3.	Ormas	Sesuai Undang-Undang tentang Ormas, bagi Ormas yang telah mendaftar ke Kemendagri atau ke Kemenkumham selanjutnya melapor keberadaannya ke bakesbangpol Provsu	Jumlah ormas yang terdaftar dan terbina	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	4.	Peringkat	Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Penanganan Konflik dan diadakan penilaian setiap tahunnya	Hasil perangkingan laporan rencana aksi setiap tahunnya (oleh Kemendagri)	Kementrian Dalam Negeri
	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	5.	%	Melakukan usaha dalam menahan laju angka prevelensi Narkotika di Sumatera Utara dengan memberi pemahaman dan pendidikan bahaya Narkoba kepada masyarakat	Perhitungan tingkat pengguna Narkotika (Perhitungan dilakukan oleh BNN)	BNN dan LIPI

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan

oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	1. Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	Orang	1.300
			Jumlah pelopor PemilihCerdas	Orang	550
			Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	Ormas	50
			Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat	7
2.	Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	2. Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	%	5,7

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.300 Orang
		Jumlah pelopor PemilihCerdas	550 Orang
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 Ormas
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7
2.	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	5,7 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.300 Orang
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	550 Orang
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	50 Ormas
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkotika Di Sumatera Utara	5,7 %

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.300 Orang	2.160 Orang	119%	Bakesbangpol Provsu
		Jumlah pelopor Pemilu Cerdas	550 Orang	800 Orang	141 %	Bakesbangpol Provsu
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 Ormas	112 Ormas	224 %	Bakesbangpol Provsu
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7	N/A	-	Kementrian Dalam Negeri
2.	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	5,7 %	N/A	-	BNN dan LIPI

Sumber : Laporan Triwulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mempunyai 2 Sasaran dan 5 Indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dari 5 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang telah mencapai target dan 2 target yang tidak memiliki data

capaian. Pada indikator Peringkat Perbaikan Laporan Peringkat Laporan Rencana Aksi tidak mencapai target karena belum adanya data yang dikeluarkan yang disebabkan adanya Permendagri Nomor 136 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, dalam pasal 116 dan 164 disebutkan bahwa Subdirektorat Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang selama ini berada di Direktorat Kewaspadaan Nasional berpindah ke Direktorat Ketahanan Ekonomi dan Sosbud. Pada Indikator Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara tidak belum mencapai target dikarenakan pada saat ini belum ada data terkait tingkat Prevalensi Narkotika pada Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.459 Orang	1.550 Orang	1.300 Orang	2.160 Orang	119%
		Jumlah pelopor PemilihCerdas	450 Orang	600 Orang	550 Orang	800 Orang	141 %
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	74 Ormas	112 Ormas	50 Ormas	112 Ormas	224 %
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 18	Peringkat 8	Peringkat 7	N/A	-
	Laju Angka Prevalensi	Menahan laju angka prevalensi	6,5 %	6,5 %	5,7 %	N/A	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Narkotika di Sumatera Utara	pengguna Narkotika di Sumatera Utara					

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Uraian penjelasan table :

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan capaian yang baik namun pada tahun 2023 terdapat 2 indikator yang belum memiliki data capaian yaitu pada indikator Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi dan Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkotika di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan belum adanya data yang disampaikan dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	2.160 Orang	5.235	41 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah pelopor Pemilih Cerdas	800 Orang	2.025	40 %
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	112 Ormas	160 Ormas	70 %
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	N/A	5,7 %	-
	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	N/A	Peringkata 7	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023 memiliki tingkat kemajuan yang berbeda. Tingkat kemajuan tertinggi terdapat pada indicator Jumlah Pembinaan Ormas yang aktif, nanum terdapat 2 indikator yang belum memiliki data kemajuan yaitu pada indicator Perbaikan Peringkat laporan rencana Aksi dan Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara karena belum adanya data realisasi kinerja pada tahun 2023.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Pada table diatas disampaikan bahwa belum ada indikator yang menjadi perbandingan dengan standar nasional.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.300 Orang	2.160 Orang	166%	Pada kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena pada kinerja ini mengoptimalkan jumlah peserta yang hadir pada setiap kegiatan yang dilaksanakan	Bakesbangpol dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatannya dengan menambah peserta dari unsur pelajar/mahasiswa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah pelopor Pemilih Cerdas	550 Orang	800 Orang	145%	Luasnya wilayah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara sehingga sulit menjangkau pemantauan situasi dan permasalahan politik menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Perlunya dilaksanakan Rakor Kepala daerah seluruh Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 Ormas	112 Ormas	224%	Adanya kegiatan sosialisasi terakit ormas memudahkan pembinaan Ormas yang aktif	Meingkatkan pembinaan ormas seperti memberikan sosiaslisasi terkait Ormas serta memberikan tugas kepada ormas untuk tetap melaporkan setiap ke aktifan organisasi tersebut
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7	N/A	-	Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum mendirikan Puskomin dan tidak berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Utara	Membentuk Forum diskusi Bidang Kewaspadaan se-Sumatera Utara guna meningkatkan koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten/Kota agar tetap rutin memberikan laporan situasi perkembangan sosial dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							keamanan di daerah
2.	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	5,7 %	N/A	-	Perlunya peningkatan koordinasi aparat dan kerjasama aparat dalam penurunan prevalensi dan pengguna narkotika di lingkungan Provinsi Sumatera Utara	Melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika untuk meningkatkan stimulus dan pengetahuan akan bahaya narkotika kepada masyarakat Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak indikator yang masih mengalami beberapa kendala dalam mencapai target yang telah ditentukan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini selalu mengupayakan hal-hal yang perlu di lakukan dalam mencapai target dari indictor yang telah ditetapkan diantaranya dengan menekankan kepada Kabupaten/Kota untuk tetap menjalankan setiap kewajiban dalam menjalankan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik serta meningkatkan kegiatannya seperti sosialisasi kepada masyarakat maupun melaksankana rakor di Kabupaten/Kota

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	1.300 Orang	2.160 Orang	166%	3.446.671.938	3.174.948.114	92,12%	80,37%
		550 Orang	800 Orang	145%	359.062.360.813	358.975.599.048	99,98%	45,49%
		50 Ormas	112 Ormas	224%	5.549.311.600	4.935.289.219	88,94%	151,87 %
		Peringkat 7	N/A	-	5.757.078.500	5.643.637.401	98,03%	-
	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	5,7 %	N/A	-	8.450.446.217	8.237.026.670	97,47%	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah melakukan efisiensi dari penggunaan sumberdaya telah diupayakan secara efisien sehingga dapat terlihat terdapat salah satu indikator yang telah mencapai lebih dari 100 % tingkat efisiennya.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	166%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	166%	Menunjang	
		Jumlah pelopor Pemilih Cerdas	145%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah pelopor Pemilih Cerdas	145%	Menunjang	
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	224%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	224%	Menunjang	
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	-	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	-	Menunjang	
	Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	-	Program Peningkatan An Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Menahan laju angka prevalensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara	-	Menunjang	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.783.438.786	16.106.297.761	95,97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.186.360	247.200.900	91,83%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.738.434.390	9.256.900.409	95,06%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.000.000	184.275.000	99,61%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.332.022.602	3.214.870.394	96,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.530.336.536	1.487.138.917	97,18%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.458.898	1.715.912.141	99,27%
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.446.671.938	3.174.948.114	92,12 %
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.446.671.938	3.174.948.114	92,12 %
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	359.062.360.813	358.975.599.048	99,98 %
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	359.062.360.813	358.975.599.048	99,98 %
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.549.311.600	4.935.289.219	88,94 %
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	5.549.311.600	4.935.289.219	88,94 %

5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.757.078.500	5.643.637.401	98,03 %
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.757.078.500	5.643.637.401	98,03 %
6.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	8.450.446.217	8.237.026.670	97,47 %
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.450.446.217	8.237.026.670	97,47 %

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Pada table ini dijelaskan bahwa terdapat 6 Program Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, serta Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara merencanakan Program dengan pagu sebesar Rp 399.049.307.657,- dengan realisasi sebesar Rp 397.072.798.213 atau dengan capaian 99,50 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara memiliki dua sasaran strategis dengan dua sasaran strategis yang telah berjalan.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya
 - a. Kurangnya sumberdaya aparatur di kesbangpol baik dari kualitas dan kuantitasnya mulai penyusunan perencanaan sampai tahap pelaksanaan dalam pencapaian target program/kegiatan
 - b. Waktu perumusan program kegiatan terkadang singkat sehingga program kegiatan yang disusun tidak optimal dan

tidak melewati proses penyusunan program kegiatan yang seharusnya bersinergi dengan pemerintah kab/kota maupun pemerintah pusat serta lembaga terkait

- c.** Sering terjadi efisiensi /refocusing anggaran mengakibatkan pencapaian target yang direncanakan tidak tercapai

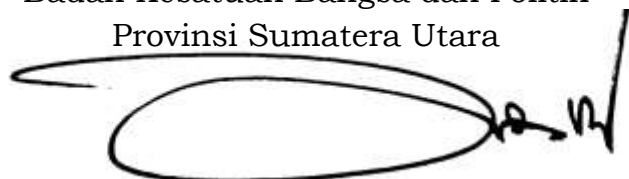
Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a.** Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sdm
- b.** Perlunya peningkatan koordinasi dengan kab/kota, antar opd, maupun pemerintah pusat serta lembaga terkait dalam penyusunan program kegiatan
- c.** Perlunya perhatian TAPD dalam penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan
- d.** Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara



Ir. Ardan Noor, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660926 199303 1 010

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :</p>	
Nama	: Ir. ARDAN NOOR, MM
Jabatan	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu	
Nama	: EDY RAHMAYADI
Jabatan	: GUBERNUR SUMATERA UTARA
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.	
<p>Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.</p>	
<p>Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Medan, 2023	
Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
GUBERNUR SUMATERA UTARA,	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA,
	
EDY RAHMAYADI	Ir. ARDAN NOOR, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19660926 199303 1 010

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Masyarakat SUMUT yang Bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	1300 Orang
		2. Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	550 Orang
		3. Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 Ormas
		4. Perbaikan Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7
2	Laju angka Prevalensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara	Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan Member Pendidikan Budaya	5,7%
3	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang berkinerja Fungsi dan Akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP Bakesbangpol Provsu	76 (BB/Sangan Baik)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah di Provinsi	Rp. 15.436.621.247	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.538.804.185	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 52.985.282.300	APBD
4. Program dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 10.787.778.970	APBD
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 7.099.311.600	APBD
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 6.322.685.300	APBD

TOTAL

Rp. 96.170.483.602

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Medan, 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2023 (Jika Ada)**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. ARDAN NOOR, MM
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua, Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA, HASSANUDIN	Pihak Kesatu, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA,  Ir. ARDAN NOOR, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19660926 199303 1 010
--	---

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Mewujudkan Masyarakat SUMUT yang Bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	1300 Orang
		Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	550 Orang
		Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 Ormas
		Perbaikan Laporan Rencana Aksi	Peringkat 7
2	Laju angka Prevalensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara	Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan Member Pendidikan Bahaya Narkotika	5,7 %
3	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang Berkinerja Fungsi dan Akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP Bakesbangpol Provsu	76 (BB/Sangat Baik)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah di Provinsi	Rp. 16.783.438.786	P. APBD
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.446.671.938	P. APBD
3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 359.062.360.813	P. APBD
4. Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial	Rp. 8.450.446.217	P. APBD
5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Rp. 5.549.311.600	P. APBD
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Rp. 5.757.078.500	P. APBD
TOTAL	Rp. 399.049.307.854	

Medan, 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010